

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

Tiovanika E. Keintjem

NPP. 29.1535

*Asdaf Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: tkeintjem@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Bitung City has sufficient local revenue but is still dependent on fund transfers from the central government, especially during the current Covid-19 pandemic so that it can affect financial performance that has not been good. **Purpose:** This study aims to determine the financial performance of the Bitung City area in realizing regional finances during the Covid-19 pandemic for a 5-year budget period seen from the analysis of financial ratios and to determine the factors that hinder regional financial performance and the efforts made to overcome these inhibiting factors. **Method:** The method used in this research is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data used in this research is the Bitung City Budget Realization Report as secondary data and the results of interviews (6 informant) as primary data. **Result:** The results show that the financial performance of the Bitung City area for the 5-year budget period from 2016-2020 is still low with an average degree of decentralization of 10.68%, the ratio of the degree of regional independence to 85.79%, the ratio of regional financial independence to 12.62% and an efficiency ratio of 498.8%, but in terms of the effectiveness of PAD management, it has shown good results with a figure of 97.94%. **Conclusion:** a strategic effort from the Regional Government is needed which can be carried out by empowering regional potential which can be used as a source of regional income and also in the form of extensification and purpose of existing sources of regional income, especially in regional taxes.

Keywords: Analysis, Financial Performance, Financial Independence, COVID-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Bitung memiliki pendapatan asli daerah yang cukup tetapi masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang belum baik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Bitung dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19 selama 5 tahun periode anggaran yang dilihat dari analisis rasio keuangan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat kinerja keuangan daerah serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor yang menghambat tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Bitung sebagai data sekunder dan hasil wawancara (6 informan) sebagai data primer. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota

Bitung selama 5 tahun periode anggaran yaitu dari tahun 2016-2020 masih rendah dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal 10,68%, rasio derajat ketergantungan daerah 85,79%, rasio kemandirian keuangan daerah 12,62%, dan rasio efisiensi 498,8%, namun dalam hal efektivitas pengelolaan PAD sudah menunjukkan hasil yang baik dengan angka 97,94%. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diperlukan upaya strategis dari Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan juga dalam bentuk ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber pendapatan daerah yang ada terutama dalam pajak daerah.

Kata kunci: Analisis, Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah, pemerintah mempunyai wewenang dalam hal mengelola sendiri kekayaan daerahnya secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Dalam mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien pemerintah telah menggariskan kebijakan otonomi yang menitikberatkan pada pemerintah Kabupaten dan Kota dan ditunjang dengan kemandirian keuangan sebagai kemampuan self supporting. Otonomi daerah memiliki tujuan secara umum yakni meningkatkan kemandirian daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah, dan mengembangkan setiap potensi-potensi wilayahnya untuk dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah. Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangannya agar tercapai tujuan pembangunan nasional. Dalam mencapai pembangunan nasional memerlukan tata kelola keuangan yang teratur dan terarah yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan di daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerahnya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah tentunya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan daerah tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengusahakan, mengelola serta mengembangkan setiap potensi yang ada di daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerahnya tanpa harus bergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat (Siregar dan Mariana, 2020:2). Disamping itu, Pemerintah Daerah mampu menyeimbangkan pendapatan daerah dengan besarnya pengeluaran daerah. Kemampuan daerah mengelola keuangannya dapat diukur melalui kinerja pendapatan asli daerah apabila pendapatan meningkat setiap tahunnya dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan daerah maka dapat dikatakan telah memiliki kemampuan keuangan.

Dalam menilai kemampuan suatu daerah, peran penting kinerja keuangan dibutuhkan. Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki kemandirian keuangan. Kinerja keuangan pemerintah diukur melalui indikator-indikator kinerja yang berperan dalam menilai kinerja, yang memberikan kontribusi dalam hal mengambil keputusan anggaran dan untuk pengawasan kinerja anggaran pemerintahan. (Zuhri dan Soleh, 2016:188)

Dalam hal analisis kinerja keuangan, Pemerintah Daerah menganalisisnya dengan menggunakan rasio keuangan akan APBD tahun berjalan sebelumnya. Dan hasil dari penggunaan rasio analisis ini dapat menjadi tolok ukur suatu daerah dalam mengetahui kemandirian keuangan daerah, mengetahui tingkat efektif dan efisiensi suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah dan mengetahui dan mengukur apa saja yang dilakukan dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Dengan menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio analisis keuangan ini, maka kita dapat mengetahui kemandirian keuangan daerah.

Corona Virus Disease atau yang masyarakat kenal Covid-19 merupakan masalah serius yang ditangani oleh pemerintah hingga saat ini. Beberapa peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah dalam penanganan pandemi. Selain dikeluarkannya peraturan-peraturan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satu daerah yang merasakan dampak dari Covid-19 adalah Kota Bitung. Kota Bitung merupakan kota dengan Pendapatan Asli Daerah yang dikatakan cukup besar dikarenakan sektor pariwisata yang maju menyebabkan pendapatan daerah pun bertambah. Pada saat ini, dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19, kebijakan tersebut juga mengakibatkan kegiatan ekspor dan impor dibatasi. Selain itu juga berdampak terhadap seluruh sektor penerimaan termasuk sektor pariwisata tersebut.

Selain itu, permasalahan lainnya menyangkut kinerja keuangan juga terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam memanfaatkan dan mengelola potensi-potensi daerah yang ada di Kota Bitung sehingga mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Bitung terhadap Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini terbukti di Kota Bitung masih banyaknya sumber daya yang belum dikelola dan dikembangkan, contohnya tempat wisata yang masih belum banyak dikenal orang padahal apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik akan menambah penerimaan daerah di Kota Bitung.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bitung harus meningkatkan pengelolaan terhadap potensi-potensi dalam hal ini potensi alam guna meningkatkan PAD serta aparatur yang mengelolanya sehingga akan menciptakan kinerja keuangan yang baik dan tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Bitung merupakan kota dengan Pendapatan Asli Daerah yang dikatakan cukup besar dikarenakan sektor pariwisata yang maju menyebabkan pendapatan daerah pun bertambah. Pada saat ini, dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga kebijakan yang telah dikeluarkan sejak awal tahun 2021 yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut juga mengakibatkan kegiatan ekspor dan impor dibatasi. Selain itu juga berdampak terhadap seluruh sektor penerimaan termasuk sektor pariwisata tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan terjadinya penurunan yang sangat signifikan dari jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik di Kota Bitung, hal tersebut mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun drastis dan mengakibatkan meningkatnya bergantungnya pemerintah daerah otonom terhadap pendapatan eksternal guna memenuhi belanja daerahnya. Selain itu, permasalahan lainnya menyangkut kinerja keuangan juga terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam memanfaatkan dan mengelola potensi-potensi daerah yang ada di Kota Bitung sehingga mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Bitung terhadap Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini terbukti di Kota Bitung masih banyaknya sumber daya yang belum dikelola dan dikembangkan,

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Nora, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudiatmaja berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan *Trend* pada Pemerintah Kabupaten Buleleng (Nora, Anjar, dkk, 2018) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah. Namun *Trend* yang dihasilkan cenderung naik. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Z. Zulkarnain yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah

kabupaten/kota di Jawa Barat (Zulkarnain, Z, 2020) menemukan bahwa rasio desentralisasi dan rasio ketergantungan masih sangat tinggi, sedangkan untuk rasio efektivitas dikatakan sudah baik. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Heri Faisal Harahap dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Harahap, 2020) mengemukakan bahwa rasio ketergantungan daerah masih sangat tinggi, dan rata-rata rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif. Penelitian Rizki Sari dan Agus Munandar berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2016-2020 (Rizki dan Agus, 2021) menemukan bahwa derajat desentralisasi Kota Malang berada pada kriteria sedang dengan jumlah PAD masih relatif kecil, tingkat kemandirian Kota Malang terletak di bawah 50% atau dalam kategori kecil, tingkat ketergantungan Kota Malang terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, realisasi penerimaan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan disertai biaya pemerolehan PAD yang sangat efisien. Selain itu, perbandingan belanja langsung memperlihatkan rata-rata yang lebih besar sehingga tercermin bahwa Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pendanaannya untuk kepentingan masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian peneliti saat dengan penelitian terdahulu yakni lokus serta data primer dan sekunder yang didapatkan. Penelitian saat ini peneliti peneliti menggunakan lima rasio kinerja keuangan daerah dari sedangkan pada penelitian terdahulu hanya empat rasio kinerja keuangan yang dipakai. Penelitian saat ini juga dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kinerja keuangan daerah yang belum maksimal. Pada penelitian saat ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melaksanakan penelitian sedangkan untuk penelitian terdahulu beberapa ada yang menggunakan metode penelitian kuantitatif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung dalam mewujudkan kemandirian keuangan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bitung dan mengetahui faktor penghambat kinerja keuangan, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Bitung untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Kota Bitung Tahun 2016-2020 dan data gambaran umum Kota Bitung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kota Bitung, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis datanya menggunakan analisis rasio keuangan dimulai dengan mengumpulkan data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung diukur dengan menggunakan rasio keuangan menurut Mahmudi (2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Bitung, saat ini penulis menggunakan analisis rasio keuangan daerah menggunakan indikator kinerja keuangan daerah berdasarkan teori rasio keuangan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung yaitu:

3.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dapat diukur dari perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal. Berdasarkan data pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kota Bitung tahun anggaran 2016-2020 peneliti menggunakan rumusan tersebut untuk mendapatkan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Bitung. Berikut hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Bitung selama lima tahun anggaran (2016-2020):

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Kota Bitung Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi (%)	Kriteria
2016	82.927.096.690,63	714.878.128.677	9,75	Sangat Kurang
2017	112.773.221.957,04	721.207.135.211	12,96	Kurang
2018	109.653.370.127,70	834.169.203.401	11,33	Kurang
2019	88.194.541.966,80	767.931.270.142	10,02	Kurang
2020	70.463.588.604,55	668.624.066.900	9,33	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas, rasio derajat desentralisasi fiskal yang berhasil memperoleh persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 12,96%. Sementara rasio derajat desentralisasi fiskal dengan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,33%. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengakibatkan tidak maksimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami perkembangan derajat desentralisasi fiskal. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami pasang surut atau penurunan. Sehingga didapatkan rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Bitung tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar 10,68%. Hasil rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Bitung selama lima tahun anggaran masih berada pada kriteria “Kurang”. Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung masih tergolong kriteria kurang dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Artinya bahwa Kota Bitung masih lemah dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga masih kurangnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total Pendapatan Daerah. Dalam rasio ini dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama yang menjadi tolak ukur, namun disini lebih melihat pada kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

3.2 Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan rasio ketergantungan menggunakan indikator pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan total pendapatan daerah. Hasil perhitungan rasio ketergantungan akan memberikan gambaran seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah dengan dana transfer. Sehingga hasil perhitungan rasio ini akan memperkuat hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio ini, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer begitupun sebaliknya. Berikut hasil perhitungan rasio derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bitung selama lima tahun anggaran (2016-2020):

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bitung 2016-2020

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah	Rasio KKD (%)	Kriteria
2016	714.878.128.677,00	714.878.128.677	84,08	Sangat Tinggi
2017	721.207.135.211,00	721.207.135.211	82,93	Sangat Tinggi
2018	834.169.203.401,00	834.169.203.401	86,19	Sangat Tinggi
2019	767.931.270.142,00	767.931.270.142	87,26	Sangat Tinggi
2020	626.040.818.119,00	668.624.066.900	88,53	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan rasio ketergantungan Kota Bitung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan, walaupun ternyata adanya penurunan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dari rasio ketergantungan Kota Bitung, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tingkat ketergantungan Kota Bitung masih termasuk pada kriteria sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan transfer yang masih mendominasi total pendapatan daerah di Kota Bitung. Dapat diketahui bahwa rata-rata persentase rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Bitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 85,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bitung masih bergantung akan dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membiayai segala urusan otonomi daerah. Dapat dilihat bahwa hingga tahun 2020 kontribusi dana transfer masih lebih besar daripada pendapatan asli daerah dalam total pendapatan daerah di Kota Bitung. Sehingga pemerintah Kota Bitung terus berupaya untuk menambah PAD dan terus berupaya untuk menciptakan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang terus meningkat hingga mampu melebihi total pendapatan transfer dalam struktur APBD Kota Bitung.

3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan pemerintahan baik itu pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, maupun hal-hal lain yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Rasio kemandirian keuangan akan memberikan kondisi kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan tanpa melibatkan sumber pendapatan eksternal. Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bitung.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2016	82.927.096.690,63	714.878.128.677,00	11,6	Rendah Sekali	Instruktif
2017	112.773.221.957,04	721.207.135.211,00	15,63	Rendah Sekali	Instruktif
2018	109.653.370.127,70	834.169.203.401,00	13,14	Rendah Sekali	Instruktif
2019	88.194.541.966,80	767.931.270.142,00	11,48	Rendah Sekali	Instruktif
2020	70.463.588.604,55	626.040.818.119,00	11,25	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Data diolah Peneliti dari LRA Kota Bitung, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 12,62% atau tergolong rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Artinya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah, Kota Bitung masih jauh dari kata mandiri. Masih adanya dominasi terhadap peran pemerintah pusat dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah saat ini masih sangat rendah atau masih jauh dari kata mandiri, walaupun menurut pemeriksaan BPK, Kota Bitung telah mencapai WTP selama 10 tahun terakhir, namun pemerintah tetap perlu melakukan perbaikan-perbaikan kedepannya sehingga akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan akan mendorong terciptanya Kota Bitung yang mandiri.

3.4 Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas merupakan tolak ukur pemerintah untuk mengetahui gambaran kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai daerah yang efektif dalam mengelola keuangannya adalah daerah yang mampu mencapai 100% perhitungan rasio efektivitasnya. Rasio efektivitas menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya terkhususnya dalam pengelolaan pendaoatan asli daerah, apakah telah mencapai yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi di daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja keuangan daerah begitupun sebaliknya apabila persentase rasio efektivitasnya rendah maka kinerja keuangan perlu dilakukan perbaikan. Hasil perhitungan rasio efektivitas daerah Kota Bitung selama lima tahun anggaran (2016 -2020) sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Efektivitas Pengelolaan PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2016	82.927.096.690,63	97.390.399.677,00	85,1	Kurang Efektif
2017	122.773.221.957,04	116.232.245.700,00	105,62	Sangat Efektif
2018	109.653.370.127,70	115.506.028.957,00	94,93	Cukup Efektif
2019	88.194.541.966,80	88.888.966.842,00	99,21	Cukup Efektif
2020	70.463.588.604,55	67.199.824.245,00	104,85	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4. di atas, dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektivitas Kota Bitung selama lima tahun anggaran yaitu pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa persentase setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. Namun dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2018 sebesar 85,1%. Pencapaian target pendapatan asli daerah Kota Bitung mampu mencapai realisasinya pada tahun 2017 dan tahun 2020. Namun, pada tahun 2016, 2018 dan tahun 2019, persentase realisasi pendapatan asli daerah Kota Bitung belum mencapai targetnya, namun persentasenya masih dalam batas wajar mendekati 100% walaupun pada tahun 2016 persentasenya dibawah 90%. Pada tahun 2017 dan tahun 2020 persentase rasio efektivitas mencapai lebih dari 100% dan tergolong dalam kriteria “Sangat Efektif”. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut Pemerintah Kota Bitung selaku pelaksana kinerja keuangan daerah dapat merealisasikan PAD melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2018, persentase capaian tingkat efektivitas termasuk dalam kriteria “Kurang Efektif” maka dapat diartikan pada tahun 2018 kinerja pemerintah Kota Bitung dalam hal memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber PAD masih kurang efektif. Sehingga realisasi PAD belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2018 dan 2019, persentase rasio efektivitas termasuk dalam kriteria “Cukup Efektif” artinya pada tahun 2018 dan tahun 2019 Kota Bitung dapat merealisasikan pendapatan asli daerah walaupun belum mencapai kriteria efektif, namun perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung sangat baik dalam memaksimalkan potensi-potensi daerah yang ada sehingga dapat mendekati kriteria “efektif”. Rata-rata rasio efektivitas keuangan Kota Bitung tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar 97,94% yang berarti Kota Bitung masih termasuk dalam kriteria “Cukup Efektif”.

3.5 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi dapat dihasilkan dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk mendapatkan hasil rasio efisiensi keuangan Kota Bitung berikut data biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dan realisasi penerimaan PAD Kota Bitung. Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan Kota Bitung selama lima tahun anggaran (2016-2020).

Tabel 5 Biaya dan Realisasi Penerimaan PAD

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2016	562.658.279.367	82.927.096.690,63	678	Tidak Efisien
2017	591.191.755.406	122.773.221.957,04	481	Tidak Efisien
2018	662.306.677.367	109.653.370.127,70	604	Tidak Efisien
2019	643.864.899.645	88.194.541.966,80	730	Tidak Efisien
2020	543.700.384.542	70.463.588.604,55	771	Tidak Efisien

Sumber: LRA Kota Bitung 2016-2020

Dapat dilihat bahwa rasio efisiensi keuangan Kota Bitung tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan pada tahun 2017 dan peningkatan pada tahun selanjutnya. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rasio efisiensi di atas 100% (>100%) tergolong tidak efisien. Artinya, kinerja keuangan pemerintah Kota Bitung dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk membiayai keseluruhan belanja daerah masih tidak efektif karena total besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan yang diterima. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya inefisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung pada tahun 2016

sampai dengan tahun 2020 diakibatkan tingginya belanja pegawai dalam hal ini tunjangan bagi para pegawai yang ada di Kota Bitung dan pada tahun 2020 adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan berkurangnya penerimaan PAD maka belanja pegawai dan belanja barang dan jasa juga sudah dikurangi namun masih menyebabkan tingginya rasio efisiensi Kota Bitung pada saat pandemic Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dalam hal ini mulai dari Kepala Badan, Kepala Sub Bagian, dan beberapa kepala bidang terkait maka mendapat kesimpulan terkait faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu adanya regulasi yang mempersempit ruang gerak pemerintah, potensi daerah dalam hal pariwisata yang belum dioptimalkan bahkan belum dimanfaatkan, kapasitas SDM yang masih minim dan adanya rolling jabatan sehingga perlu penyesuaian kembali, komposisi APBD yang tidak seimbang, sarana prasarana yang belum memadai, masih terdapat anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, target pendapatan tidak sesuai dengan potensi pendapatan, dan terkait dengan pengaplikasian SIPD dan SIMDA.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bitung dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mengganggu kinerja keuangan daerah Kota Bitung adalah meningkatkan kompetensi ASN dalam bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pelatihan dan bimtek, meningkatkan potensi-potensi daerah seperti pariwisata, perkebunan kelapa dan perikanan, penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga anggaran yang ditetapkan dapat diserap oleh setiap SKPD, penetapan potensi pendapatan melalui analisa berdasarkan potensi daerah sehingga target yang ditetapkan tercapai, mempelajari dan memperbarui aplikasi SIPD sehingga mempermudah dalam pengelolaan keuangan, melakukan kegiatan monitoring pajak restoran/rumah makan apakah telah menggunakan alat perekam untuk mengenakan PPN 10%, melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait yang dapat menambah penerimaan daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Kinerja keuangan daerah Kota Bitung dilihat dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan kelima rasio, maka dapat dilihat kinerja keuangan daerah Kota Bitung masih sangat kurang. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka pada tahun 2020 posisi kinerja keuangan daerah Kota Bitung menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dikarenakan pada penelitian saat ini peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terbaru yang menyebabkan kinerja keuangan daerah di Kota Bitung belum memperoleh hasil yang maksimal. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kota Bitung diharapkan secara jangka panjang mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di Kota Bitung sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian Kota Bitung sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung tahun 2016 - 2020 masih dalam kategori kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dari pengelolaan pendapatan asli daerah yang sudah baik, namun dari sisi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan efisiensi belanja daerah yang belum baik. Adapun faktor penghambat kinerja keuangan daerah Kota Bitung adalah potensi daerah dalam hal pariwisata yang belum dioptimalkan bahkan belum dimanfaatkan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan meningkatkan potensi-potensi daerah seperti pariwisata, perkebunan kelapa dan perikanan,

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus karena waktu yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja keuangan daerah Kota Bitung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat memberikan saran dalam perbaikan pengelolaan keuangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Ed. Rev. V). Rineka Cipta.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Nora, Anjar. dkk., 2018. “*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng*”, Bisma Jurnal Manajemen.
- Zulkarnain, Z., 2020. “*Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Barat*”, Jurnal Cakrawala.
- Harahap, Heri Faisal., 2020. “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*”, Jurnal of Economics and Bussines Universitas Andalas.
- Siregar, A. O. D., & S, I. M, 2020. “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat)*”, Jurnal Image.
- Wahyuddin, W., & Sugianal, N., 2017. “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe*”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N., 2020. “*Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*”. Ekonomis: Journal of Economics and Business.
- Zuhri, M., & Soleh, A., 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis.